

# **Masalah Sosial dan Budaya dalam Proses Transformasi Perdesaan: Pengalaman dari Program Transmigrasi dan MIFEE di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua<sup>1</sup>**

**R. Yando Zakaria<sup>2</sup>**

## **Pengantar**

Sebagaimana dikemukakan Vel (2010), selalu terdapat sejumlah ketegangan dalam proses intervensi cq. pembangunan di wilayah perdesaan (baca: transformasi perdesaan). Tak terkecuali di Indonesia. Sebab, jelas Vel, (pembangunan) "... bukan hanya dalam wujud perancangan tindakan-tindakan langsung untuk menyelesaikan sasaran-sasaran yang dapat saja ditetapkan terlebih dahulu..." melainkan juga soal persaingan antara kegiatan baru dengan yang sudah ada; dari segi waktu dan sumberdaya; dari segi organisasi; dan (yang terpenting) persaingan antar gagasan.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, merancang program pembangunan harus dimulai dari ekonomi tradisional, sebagaimana yang dapat dikenali dari wawasan pengetahuan dan praktik-praktik kebiasaan. Meskipun ekonomi tradisional tidak selalu selaras dengan tujuan/kegiatan pembangunan, tetapi ia mencerminkan kenyataan ekonomi sebagaimana dipahami oleh penduduk setempat.

Persepsi lokal ini merupakan landasan bagi pengkajian dan pengembangan gagasan dan kegiatan pembangunan. Jadi, artinya, bukan menerima keadaan ekonomi ini apa adanya. Sebaliknya, itu diperlukan agar ada suatu pemahaman yang mendalam guna menerjemahkan rumusan perubahan yang dicanangkan ke dalam gagasan local, mengidentifikasi pembatasan-pembatasan agar mampu merancang alternatif-alternatif yang dapat diterima.

Dalam konteks ekonomi Orang Sumba yang bermukim di Kampung Lawonda, misalnya, sebagaimana dibahas Vel, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi lokal yang memainkan peran penting dalam memajukan ataupun menghambat suatu intervensi pembangunan adalah hal-hal yang menyangkut moralitas yang ada dalam sebuah pertukaran; perkembangan sejarah yang berdampak terhadap

---

<sup>1</sup> Makalah yang dipresentasikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional "Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi: Quo vadis Pedesaan di Indonesia". Diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, Bandar Lampung, tanggal 10 - 11 Juni 2019.

<sup>2</sup> Antropolog, pendiri dan peneliti pada Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat, Yogyakarta.

<sup>3</sup> Lebih lanjut lihat Jacqueline Vel, 2010, *Ekonomi-Uma, Penerapan adat da;am dinamika ekonomi berbasis kekerabatan*. Jakarta: Kerjasama HuMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Leiden University, dan KITLV, Jakarta.

kehidupan perekonomian; gagasan tentang kerja; organisasi tradisional; pembagian tugas; dan pemahaman tentang penguasaan tanah dan pertukaran hak penggunaan tanah.<sup>4</sup>

Hanya dengan perspektif yang demikianlah, tentu saja sebagai salah satu alternatif perspektif yang dapat dipilih, baru kita dapat memahami mengapa program-program pembangunan dari atas yang diselenggarakan di Papua selama ini, seperti program transmigrasi, industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan bahkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat dikatakan hampir tidak ada yang berhasil meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua secara signifikan, sebagaimana akan dibahas dalam bagian-bagian berikut.

### **Situasi lokal**

Merujuk kepada klasifikasi berdasarkan kepada tingkat kepadatan penduduk sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat (1994a), wilayah Kabupaten Merauke termasuk ke dalam wilayah dengan Penduduk Tipe 2. Artinya, penduduk di wilayah ini banyak yang tinggal di hulu-hulu sungai besar dan kecil yang terdapat di bagian Selatan Papua. Mata pencarian utama adalah meramu sagu dan berburu. Mereka juga kadang-kadang mencari ikan di sungai. Mereka tidak tahu berkebun dan tidak hidup menetap di desa-desa. Penduduk Tipe 2 ini hidup dalam kelompok-kelompok yang berpindah-pindah walaupun mereka sebenarnya mereka memiliki tempat-tempat yang tetap di dalam hutan tempat mereka berkemah. Mereka juga memiliki tempat-tempat yang dianggap keramat. Tempat-tempat keramat ini mereka anggap sebagai tempat asal-usul nenek-moyang mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan system klasifikasi yang lain, yakni klasifikasi primer berdasarkan beberapa unsur kebudayaan yang tampak mencolok, para hali membagi wilayah Papua itu ke dalam 23 'daerah kebudayaan' (*culture area*). Sebelum perang, klasifikasi ini dipakai oleh Pemerintah Belanda untuk membagi wilayah jajahannya itu ke dalam 23 wilayah administratif yang disebut *onderafdeling*, lebih kecil/rendah dari Kabupaten sekarang, atau lebih besar/tinggi dari Kecamatan sekarang. Menurut kategori ini Merauke merupakan salah satu dari 23 daerah kebudayaan itu.<sup>6</sup>

Dari segi kepemimpinan, menurut klasifikasi yang dikemukakan oleh Mansoben (1994), kepemimpinan di Merauke tergolong ke dalam system kepemimpinan

---

<sup>4</sup> Lebih lanjut lihat Jacqueline Vel, 2010, *Ekonomi-Uma, Penerapan adat dalam dinamika ekonomi berbasis kekerabatan*. Jakarta: Kerjasama HuMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Leiden University, dan KITLV, Jakarta.

<sup>5</sup> Lihat Koentjaraningrat, 1994a. "Pendahuluan", dalam Koentjaraningrat, *et.al., eds.*, 1994a. *Irian Jaya, Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, 1994b, "'Dinamika dan Kebhinekaan Penduduk'" dalam Koentjaraningrat, *et.al., eds., op.cit.*, hal. 106.

pria berwibawa. Ciri umum dari masyarakat dengan system kepemimpinan pria berwibawa adalah kedudukan kepemimpinan diperoleh melalui upaya pencapaian. Sumber kekuasaan dalam tipe kepemimpinan ini adalah kemampuan pribadi seseorang yang terwujud nyata dalam keberhasilan ekonomi (kaya), kepandaian berdiplomasi dan berpidato, keberanian memimpin peran, memiliki tubuh yang besar dan tegap, serta memiliki sifat murah hati. Ciri lain dari tipe kepemimpinan ini ialah bahwa seluruh kekuasaan dijalankan oleh pemimpin sejati itu secara otonomi tunggal.<sup>7</sup>

Dilihat dari klasifikasi pengelompokan kelompok etnik, wilayah Kabupaten Merauke sekarang ini dapatlah dikatakan merupakan *labenstraum* (wilayah kehidupan) 'suku besar' Malind Anim.<sup>8</sup> Sebelum terjadi pemekaran di Kabupaten Merauke, di Kabupaten Merauke juga terdapat 'wilayah hidup' 4 (empat) 'suku besar' lainnya, yakni Mappi, Asmat, Muyu, dan Mandobo. Saat ini 'Suku besar' Mappi sekarang terdapat di Kabupaten Mappi, dan Asmat di Kabupaten Asmat. Sementara 'suku besar' Muyu dan Mandobo terdapat di wilayah Kabupaten Boven Digul. Karena sesuatu dan lain hal, kelompok-kelompok Orang Muyu (dan Mandobo) juga menuntut pemekaran Kabupaten Boven Digul, dengan membentuk sebuah kabupaten baru lainnya, yakni Kabupaten Muyu (dan Mandobo), dan sepertinya keinginan itu belum terkabulkan.<sup>9</sup>

Meski begitu, sebagaimana terungkap dalam beberapa lokakarya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, saat ini di Kabupaten Merauke juga masih terdapat tanah-tanah ulayat atau tanah adat beberapa marga atau suku dari 'suku besar' non Malind Anim. Hal ini terjadi sebagai hasil berbagai proses sosial dan politik yang melibatkan masing-masing 'suku besar' pada masa lalu, seperti perperangan antar suku misalnya. Meskipun tanah-tanah ulayat non-Malind Anim itu dianggap berasal dari 'suku besar' Malind Anim, Orang Malind Anim sendiri tidak berhak lagi atas bidang tanah dimaksud.<sup>10</sup>

Orang Malind pada umumnya masih hidup dalam tradisi masyarakat berburu dan meramu.<sup>11</sup> Menurut Koentjaraningrat (1970), moda produksi berburu dan

---

<sup>7</sup> Lihat J.R. Mansoben, 1994, "Kebinekaan Sistem Kepemimpinan Tradisional di Irian Jaya", dalam Koentjaraningrat, 1994a, *et.al., eds., op.cit.*, hal. 385.

<sup>8</sup> Lihat misalnya diskusi yang terjadi selama Lokakarya Hasil Identifikasi Tempat Penting Masyarakat Suku Besar Malind Anim dalam Bio-Visi Ecoregion Trans Fly. Lihat Tim WWF Kantor Merauke, 2006, "Laporan Lokakarya Hasil Identifikasi Tempat Penting Masyarakat Suku Besar Malind Anim dalam Bio-Visi Ecoregion Trans Fly", Merauke, 19 - 21 September 2006. Kerjasama WWF, LMA Malind Anim, Taman Nasional Wasur, Pemda Merauke, Ford Foundation, dan DEHUT - DFID.

<sup>9</sup> Lihat Tim Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, 2009, *op.cit.*

<sup>10</sup> Lihat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, 2010, "Laporan Proses, Hasil, dan Tindak Lanjut Pelatihan Lanjutan Agraria", Merauke, 3 - 6 Mei 2010.

<sup>11</sup> Lihat Tim WWF Kantor Merauke, 2006, *op.cit.* Lihat juga Laporan-laporan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diselenggarakan di Kabupaten Merauke, misalnya, PT. Widya Cipta Buana, Januari 2008, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana

meramu ini adalah suatu cara penopang kehidupan yang telah mulai dikenal sejak sejak 110 abad SM. Sementara itu, mata pencarian bertani padi di sawah beririgasi baru dikenal pada abad 14. Dengan kata lain, antara kedua moda produksi itu, terdapat rentang waktu sekitar 125 abad lamanya.<sup>12</sup>

Data dimaksud menunjukkan bahwa perlu waktu sepanjang sekitar 125 abad bagi evolusi dari moda produksi berburu dan meramu menjadi moda produksi bertani padi sawah beririgasi itu. Adanya rentang waktu evolusi yang sangat panjang itu mengindikasikan adanya kerumitan dalam proses evolusi dari moda produksi berburu dan meramu menjadi pertanian padi berisirigasi. Meminjam kerangka pikir berkaitan dengan penyerapan suatu teknologi (*Technology Receptivity*) yang dikemukakan Thorne Steve (2007), perbedaan antara kedua moda produksi itu tidak saja menyangkut jenis teknologinya (aspek *hardware* dari moda produksi yang bersangkutan), melainkan juga hal-hal yang menyangkut aspek *software* dan *orgware*-nya.<sup>13</sup>

### **Pengalaman transmigrasi**

Studi Karafir (1984) tentang program transmigrasi di Warmare, Manokwari, misalnya, bisa menjadi contoh. Dalam tulisan itu ditunjukkan bahwa tingkat penerimaan transmigran lebih baik dari pada penduduk setempat. Ketika penelitian yang dilakukan Karafir sedang berlangsung, sekitar 10 tahun dari waktu pelaksanaan program transmigrasi di daerah itu, transmigran dari Jawa sudah bisa membangun rumah beton, sementara penduduk asli tidak.

Padahal kedua-duanya sama-sama mengalami penurunan produksi akibat tingkat kesuburan tanah yang terus menurun, sementara pengeluaran makin tinggi dari tahun ke tahun. Begitu pula nilai tukar petani juga terus menurun. Gap ekonomi antara kedua kelompok makin besar dari tahun ke tahun.

Ditemukan pula kenyataan bahwa belum ada bukti yang jelas bagaimana hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat perkembangan masyarakat. Dari segi perbaikan taraf hidup, tidak ada interaksi positif antara transmigrasi dan penduduk setempat.

---

Kegiatan IUPHHK - HT - HTI Pulp, PT. Selaras Inti Semesta; Analisis Dampak Lingkungan Hidup Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Dongin Prabhawa, Februari 2009; dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Bio Inti Agrindo, April 2009.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, 1970, "Pendahuluan", dalam Koentjaraningrat, 1970, *ed.*, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*". Jakarta: Penerbit Djambatan.

<sup>13</sup> Menurut pendekatan ini, penyerapan teknologi tidak hanya menekankan aspek penerimaan terhadap teknologi yang bersangkutan (*hardware of technology*), seperti perangkat mesin, tapi juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses, yang disebut dengan perangkat lunak (*software*) dan pengorganisaian (*orgware*) dari teknologi yang bersangkutan. Lebih lanjut lihat Thorne Steve, 2007. *Towards a framework of Clean Energy Technology Receptivity*, SouthSouthNorth Project.

Asumsi yang mengatakan bahwa kehadiran kaum transmigran yang memiliki pengalaman di dunia pertanian dapat meningkatkan ketrampilan penduduk asli harus dipertanyakan kebenarannya. Oleh sebab itu Karafir mengusulkan bahwa transmigrasi sebagai proyek pemupukan persatuan Nasional dan peningkatan pemerataan taraf hidup masyarakat harus diformulasikan ulang. Perlu diciptakan mekanisme lain yang memungkinkan interaksi ini menjadi lebih positif.<sup>14</sup>

Gambaran umum capaian program transmigrasi sebagaimana yang diulas Karafir di atas juga dapat kita saksikan di lokasi program transmigrasi terkemuka lainnya di Tanah Papua, yakni di Kawasan Kurik dan Muting, Kabupaten Merauke. Dalam kunjungan lapangan saya yang singkat di penghujung Juli 2010 lalu, saya menyaksikan para transmigran yang dulu mulai dimukimkan sekitar tahun 1980-an dan awal 1990an saat ini tidak ada lagi yang tinggal di rumah-rumah pembagian dari Departemen Transmigrasi dulu. Sekarang mereka telah membangun rumah-rumah beton baru sebagai penggantinya.

Sebaliknya peserta program 'transmigrasi lokal' -- alias penduduk asli setempat - - masih saja tetap tinggal di rumah pembagiannya dulu. Malah kondisi rumah tersebut sudah jauh lebih buruk dari yang pernah saya saksikan sekitar 10 tahun lalu. Hampir tidak ada rumah baru yang dibangun sendiri oleh penduduk asli ini. Beberapa rumah malah sudah tidak lengkap lagi pintu atau jendelanya. Perabotan rumah tangga pun terlihat sangat minim.

Menurut beberapa peserta program transmigrasi lokal yang sempat diwawancarai, mereka memang tidak sepenuhnya hidup di 'desa baru' mereka itu. Mereka masih sering kembali ke desa lama, di mana hutan-hutan sagu mereka berada, ataupun tinggal di hutan untuk jangka waktu tertentu, selama mereka melakukan perburuan. Mereka memang belum turun ke sawah, meski mereka juga menerima jatah lahan sawah itu.

Nyatalah bahwa latar asal-usul sebagai masyarakat berburu dan meramu itu berpengaruh bagi dapat atau tidaknya penduduk setempat (baca; orang asli Papua) memanfaatkan kesempatan ekonomi baru yang terbuka di daerah itu. Jika dengan moda produksi ala program transmigrasi saja daya adaptasi penduduk asli itu begitu rendah, bagaimana pula nanti dengan moda produksi yang dikembangkan dalam program MIFEE yang memiliki *hardware*, *software*, dan *orgware* yang jauh lebih canggih?<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Yan Pieter Karafier, 1984, "Perbedaan Taraf Hidup Transmigran Nasional dan Penduduk Setempat di Warmare, Manokwari", dalam E.K.M. Masinambow, ed., *Maluku dan Irian Jaya*. Buletin LEKNAS, Vol. III, No. 1, 1984, Terbitan Khusus. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengathuan Indonesia.

<sup>15</sup> Ulasan ini akan semakin lengkap lagi jika tersedia data-data terstruktur yang menunjukkan kegagalan mekanisme ganti rugi tanah-tanah yang terkena proyek dan/atau dampak proyek di kawasan pertambangan PT. Freeport di Kabupaten Mimika. Pengalaman pribadi yang saya

## Program MIFEE

Program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE pada dasarnya adalah hasil pertemuan dua arus kepentingan (baca: kebijakan). Di satu sisi, MIFEE adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mempercepat upaya-upaya peningkatan kesejahteraan warga (baca: Pembangunan) Kabupaten Merauke yang telah digagas sekitar 3 tahun yang lalu.

Pada tahun 2007, bersamaan dengan peringatan HUT Kabupaten Merauke yang ke 105, Pemerintah Kabupaten Merauke mencanangkan Tahun Investasi yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Bupati Merauke dengan sejumlah investor untuk merealisasikan sebuah program yang kala itu masih bertajuk *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE). Program ini tertuang ke dalam program masa jabatan kedua -- tahun 2005 -- 2010 -- Bupati John Gluba Gebze. Di sisi lain, MIFEE merupakan salah satu muara upaya Pemerintah Pusat dalam mengatasi masalah krisis pangan dan energi, sekaligus sebagai upaya penghematan dan penghasilan devisa.<sup>16</sup>

Pilihan atas Kabupaten Merauke ini tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama yang sering didengung-dengungkan adalah ketersediaan lahan potensial yang luas, cukup air, dan belum tergarap secara sempurna. Dalam sebuah *presentation slides* yang disiapkan Pemerintah Daerah setempat ada *slide* yang menampilkan gambar dan tulisan: "Kami bukan merenung nasib karena tidak punya tanah, tapi kami sedang berfikir kenapa tanah luas anugerah Allah ini tidak dikelola/digarap menjadi daerah pertanian. Kami rindu sekali daerah kami kelak bisa menjadi daerah pertanian maju dan modern".<sup>17</sup>

Wilayah Kabupaten Merauke memang terhitung sangat luas. Sebelum pemekaran pada tahun 2002 luas kabupaten ini adalah 119.749 Km<sup>2</sup> (atau sekitar 11.994.900 ha.) Setelah pemekaran pada tahun 2002 lalu, luas Kabupaten Merauke menyusut menjadi 45.071 Km<sup>2</sup> atau sekitar 4,5 juta Ha, yang terdiri dari lahan non-budi daya seluas sekitar 2 juta ha; dan lahan budidaya sekitar 2,5 juta ha. Ini pun masih terhitung sangat luas jika dibandingkan dengan lusan kabupaten-kabupaten yang ada di Tanah Jawa, misalnya. Menurut perhitungan, luas lahan cadangan potensial sekitar 2,5 ha, yang terdiri dari 0,6 juta Ha (sekitar 24%) merupakan lahan kering, dan sekitar 1,9 juta ha (sekitar 76%) merupakan lahan basah.<sup>18</sup>

---

diperoleh dari sebuah kunjungan singkat ke wilayah itu menunjukkan fakta adanya 'kegagalan adaptasi' juga.

<sup>16</sup> Lihat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 2010; KADIN, 28-29 Januari 2010; dan Feed The World, 28 Januari 2010.

<sup>17</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, "MIFEE, Program Konkrit dalam Mewujudkan Merauke Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pangan Nasional", Bahan Presentasi dan Sosialisasi Program MIFEE.

<sup>18</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *ibid.*

Adapun rancangan peruntukan pemanfaatan lahan dalam kawasan budidaya adalah: HPK: 1.428.000 ha (57,31%); HPT: 860.953 ha (34,55%); dan APL: 202.869 ha (8,14%). Dari analisis potensi efektif lahan berdasarkan analisis Tim BKTPRN Tata Ruang lahan yang potensial dikembangkan lebih jauh adalah seluas 1,283.000 ha, dengan alokasi pemanfaatan untuk pangan 50%; tebu 30%; dan sawit 20%.<sup>19</sup>

Menurut rencana penguasaan lahan dalam program MIFEE akan terbagi ke dalam sejumlah klaster @ 5.000 ha, yang terfokus pada distrik kawasan sentra produksi pertanian (KSPP). Kegiatan akan diselenggarakan oleh BUMN khusus pangan dan BUMP, dengan melibatkan swasta besar melalui keterlibatan para-pihak (*stakeholders*) agribisnis melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan; penenrapan manajemen mekanisasi perertanian. Program juga akan diupayakan melalui upaya *link and match* di bidang sumberdaya manusia dan inovasi teknologi; penerapan teknologi yang *zero waste* melalui penerapan Sistem Integrasi Tanaman Ternak Perikanan Perkebunan Bebas Limbah (SITTPP-BEL). Untuk itu, program juga akan memaduserasikan sektor-sektor dalam penataan ruang daerah; penerapan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan produksi akan terfokus pada beberapa komoditi strategis, seperti padi, sagu, jagung, kedelai, umbi-umbian, kelapa sawit, tebu, dan buah-buahan (utamanya mangga, jeruk dan pisang); serta sapi. *Output* akhir program MIFEE adalah pangan, pakan, bahan bakar nabati, pupuk organik, bibit/benih unggul dan system financial yang andal.<sup>20</sup>

Dalam konteks yang demikian penting untuk mempertanyakan apakah apakah MIFEE dapat menampilkan diri sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang merekognisi eksistensi Orang Papua Asli (OPA) dengan segala atribut sosial dan kebudayaannya, dan sekaligus sebagai proyek pembangunan yang mengusung paradigma baru yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan dan pemberdayaan OPA, demi mengatasi ketidaktentraman kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Tanah Papua selama ini, sebagaimana yang disarankan oleh Koentjaraningrat (1994) lebih satu dekade lalu,<sup>21</sup> dan ditegaskan kembali oleh TIM Peneliti LIPI (2010)?<sup>22</sup>

Berita yang dilansir Harian KOMPAS berikut dapat menjadi indikasi awal gagalnya penduduk beradaptasi dengan MIFEE. Tingkat pendidikan yang rata-

---

<sup>19</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *ibid.*

<sup>20</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *ibid.*

<sup>21</sup> Lihat Koentjaraningrat, *et.al., eds., 1994. Irian Jaya, Membangun Masyarakat Majemuk.* Jakarta: Djambatan.

<sup>22</sup> Muridan S. Widjojo, *et.al., 2010, Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future.* Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Buku versi Bahasa Inggris terbit pada tahun 2010 ini, diterbitkan atas kerjasama KITLV, LIPI, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

rata hanya tamat Sekolah Dasar membuat penduduk setempat kalah bersaing dengan pencari kerja dari luar. Akibatnya, Marius Moiwend, warga kampung Sanggase, Distrik Okaba, dan beberapa rekannya ditolak bekerja PT. Medcopapua Industri Lestari karena tidak memiliki ijazah SMP. Padahal Marius hanya ingin menjadi satpam di perusahaan itu.<sup>23</sup>

Situasinya akan makin memburuk ketika tempat-tempat keramat Orang Malind tergusur oleh keberadaan proyek. Betapapun tempat-tempat keramat itu adalah pelabuhan spiritualitas pribadi maupun kelompok yang penting. Berdasarkan Peta Tempat Penting Suku Marind, yang dibuat oleh WWF Region Sahul Papua, diketahui bahwa aktifitas perusahaan potensial menggusur situs-situs penting suku Marind di Merauke.<sup>24</sup>

Betapapun situs-situs ini adalah tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah, religius, sekaligus mempunyai fungsi sosial dan perlindungan lingkungan. Perusakan terhadap situs-situs yang dianggap keramat dan sakral itu akan berpengaruh pada keseimbangan social dan spiritualitas pribadi-pribadi dalam komunitas-komunitas yang bersangkutan.

### **Revolusi Demografi**

Perbedaan *mode of production* yang dikenal dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk asli di mana proyek-proyek dalam program MIFEE akan beroperasi di satu sisi dan *mode of production* yang dibawa dan dikembangkan oleh proyek-proyek itu sendiri, seperti telah disinggung di atas, telah membuat penduduk asli itu tidak terserap – untuk tidak mengatakannya tersingkir – dalam program MIFEE.

Padahal, dalam konteks yang lain, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan secara total memang tidak sedikit. Menurut sebuah sumber, agar mega proyek itu dapat bekerja sebagaimana mestinya, untuk setiap hektar diperkirakan membutuhkan sekitar 4 tenaga kerja.<sup>25</sup>

Itu berarti, secara total, dibutuhkan sekitar 4,8 juta tenaga kerja. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Merauke saat ini yang hanya sekitar 300 ribu jiwa saja. Setengah dari total jumlah penduduk Kabupaten Merauke sekarang adalah kaum pendatang

---

<sup>23</sup> Harian Kompas, Tanggal 6 Agustus 2010.

<sup>24</sup> Tim WWF Kantor Merauke, 2006, *op.cit.*

<sup>25</sup> Siwono Yudhohusodo, dalam KOMPAS.Com. Berkembang rumor di tengah aktivis bahwa Siwono, mantan Menteri dari zaman Orde Baru, bos kelompok usaha Bangun Cipta Sarana, sebuah kelompok usaha yang juga telah mulai berinvestasi di Kabupaten Merauke, adalah aktor penting yang berupaya sekuat tenaga untuk menggolkan RUU Hortikultura yang baru-baru ini telah disahkan menjadi Undang-undang. Konon Yudhohusodo sampai menunggui panitia kerja bekerja merumuskan pasal-pasal yang akan dimuat dalam kebijakan di sektor hortikultura itu. Seperti telah disinggung dalam bagian terdahulu, undang-undang ini juga bermasalah karena mengandung sejumlah pasal yang potensial merugikan petani kecil.

yang masuk melalui program transmigrasi maupun migrasi spontan. Maka, diperkirakan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yakni sekitar 10 sampai 20 tahun mendatang, jumlah penduduk asli hanya akan sekitar 5% saja dari jumlah penduduk Kabupaten Merauke secara keseluruhan!

Situasi ini berlipat-lipat parahnya jika dibandingkan keadaan saat ini yang sejatinya sudah dinilai sangat genting juga. Dalam bagian terdahulu telah disinggung bahwa secara kuantitatif, di Papua secara umum telah terjadi revolusi demografis yang radikal yang mengakibatkan dislokasi dan *displacement* orang asli Papua. Pada tahun 1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%. Setelah 'bergabung' dengan NKRI porisi ini meningkat menjadi 4% pada tahun 1971. Pada tahun 2000, sekitar 30 tahun setelah Papua dibangun dala kerang NKRI, penduduk pendatang telah mencapai angka 35% dari populasi. Menurut perkiraan, pada tahun 2011 akan mencapai angka 53,5%!<sup>26</sup>

Persoalan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai proyek pembangunan memang sudah menjadi persoalan yang dilematis sejak lama. Terkait soal ini di Papua, Koentjaraningrat (1994c) pernah menulis: "... Di Irian Jaya (sekarang Papua, *pen.*) hal itu ternyata merupakan aspek yang lebih kompleks daripada keadaannya di daerah-daerah lain di Indonesia. Pertama-tama masalah yang dihadapi adalah kurangnya jumlah penduduk, tidak hanya untuk tenaga kerja yang terampil, melainkan juga tenaga kerja kasar untuk tingkat-tingkat terendah sekalipun. Mendatangkan orang-orang asli dari Irian Jaya dari daerah-daerah lain, seperti Orang Muyu, Ngalum, atau Sentani untuk perkebunan di Arso, dan Orang Biak atau Yapen untuk perkebunan di Prafi, yang memang telah dilaksanakan, ternyata belum mencukupi kebutuhan akan tenaga kerja. Sebaliknya, masalah-masalah lain akan muncul apabila didatangkan tenaga kerja tambahan dari luar Irian Jaya, yaitu penduduk asli akan merasa dirinya terdesak, karena bagaimanapun, atas enaga kerja pendatang lebih mudah dilakukan seleksi dank arena itu mereka pada umumnya lebih terdididik dan terampil daripada tenaga kerja penduduk asli. Karena itu perlu diadakan sekolah-sekolah kejuruan dan pendidikan ketrampilan di daerah sekitat perkebunan, terutama bagi para pemuda penduduk asli".<sup>27</sup>

Persoalan 'revolusi demografi' bisa segera menghadang di depan mata, sesuatu yang pernah dikuatirkan oleh Uskup Agung Merauke pada suatu kesempatan lokakarya bersama masyarakat local di penghujung tahun 2009 lalu. Dikatakan bahwa penduduk asli setempat di masa depan tidak saja akan menjadi minoritas dalam jumlah, tetapi juga akan menjadi minoritas dalam arti pengaruh, baik dalam hal budaya, ekonomi, dan juga politik.

---

<sup>26</sup> Widjojo, *et.al.*, 2010, *op.cit.* Lihat juga Koentjaraningrat, 1994a, 1994b, dan Koentjaraningrat, *et.al.*, eds., 1994, *op.cit.*

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, 1994b, *loc.cit.*, dalam Koentjaraningrat, 1994, *et.al.*, eds., *op.cit.*, hal 427 - 428.

Tanpa kebijakan afirmatif, seperti kebijakan soal ‘Putra Daerah’ sebagai calon Kepala Daerah, dengan system politik yang ada sekarang, khususnya yang menyangkut system pemilihan langsung dalam pemilihan kepala daerah, calon dari kalangan penduduk asli akan segera kalah oleh calon-calon asal pendatang. Kembali, akan sulit menampik tuduhan adanya *slow motion genocide* itu.<sup>28</sup>

## Penutup

Masalah ‘revolusi demografi’ ini memang harus dicermati secara sungguh-sungguh. Betapapun hubungan antara Orang Papua Asli dengan para pendatang, khususnya sesama warga Negara Republik Indonesia, bolehlah dikatakan kurang harmonis. Terutama kepada mereka-mereka, penduduk non-papua yang berada disetor formal (birokrasi) dan juga sector ekonomi. Tanpa riset mendalampun orang akan segera mahfum bahwa sector ekonomi ini hampir seluruhnya dikuasai oleh penduduk pendatang. Sedikit sekali yang tercecceh bagi Orang Papua. Kecurigaan dan ketidakpercayaan antara kedua pihak itu berakar pada sejarah yang panjang. Pendekatan represif yang dilakukan selama beberapa decade terakhir juga memperburuk situasi.

Apa yang pernah ditekankan oleh Koentjaraningrat & Ajamiseba (1994) perlu direnungkan secara sungguh-sungguh. Begini tulisnya: “... Perasaan tidak puas penduduk asli Irian Jaya terhadap Pemerintah Indonesia dan orang-orang Indonesia yang berasal dari propinsi-propinsi lain, mulai tampak tidak lama setelah Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia, yang agaknya diakibatkan oleh kekecewaan mereka terhadap perilaku ketamakan para pendatang dan banyak oknum yang ditugaskan didaerah itu. ... para pendatang tersebut dalam kurun waktu antara tahun 1963 dan 1969 telah mempergunakan perbedaan nilai rupiah Indonesia untuk membeli barang-barang yang tersedia di Irian Jaya untuk dijual di daerah lain dengan keuntungan yang sangat besar”.<sup>29</sup>

Ketersingkirkan Orang Papua Asli dalam arus pembangunan tentu saja akan kembali mempertegas jarak social antara OPA dan non-OPA yang ada di lokasi-lokasi yang bersangkutan. Perasaan rendah diri, serta makin bercokolnya sejumlah sikap dan mentalitas negative semacam ‘malas, suka mabuk, dan tidak disiplin’, sebagaimana yang dilansir Prof. Koentjaraningrat dan kawan-kawan beberap dekade lalu dapat saja makin berkembang dan terus meluas.

Semuanya itu, pada akhirnya, akan bermuara pada bermasalahnya upaya pemenuhan hak-hak dasar penduduk asli itu sendiri. Tentu saja kita semua tidak mau ‘ramalan’ itu – jika dapat dikatakan begitu – akan menjadi kenyataan.\*\*\*

---

<sup>28</sup> Lihat Widjojo, *et.al.*, 2010., *op.cit.*

<sup>29</sup> Koentjaraningrat dan D. Ajamiseba, 1994, “Reaksi Penduduk Asli Terhadap Pebangunan dan Perubahan”, dalam dalam Koentjaraningrat, 1994, *et.al.*, *eds.*, *op.cit.*, hal. 433 -434. Lihat juga Koentjaraningrat, 1994b, dalam Koentjaraningrat, 1994, *et.al.*, *eds.*, *op.cit.*, hal. 403.